

# ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG KEMANDIRIAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Reza Fachmil Azhar

NPP. 30.1264

*Asdaf Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: refaz.rfz@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Idris, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on regional problems in Banggai Regency, which until now still has a very large dependence on grants from the center to finance regional needs. This gives the view that the regional financial management of Banggai Regency has not been managed optimally and indicates the level of regional independence of Banggai Regency which is still very low. In addition, an analysis of regional original income (PAD) is also needed, which consists of calculating the ratio of the degree of decentralization, the ratio of dependency, the ratio of regional independence, and the increase in income each year. **Purpose:** The purpose of this research is to describe the causes of the lack of PAD in Banggai Regency in 2017-2021. The data used is the Budget Realization Report (LRA) of the Banggai Regency Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for 2017-2021. **Method:** This research method uses a qualitative approach and inductive way of thinking. With data collection techniques, namely interviews with 4 people from the Banggai Regency Regional Revenue Agency as well as documentation with related documents. **Result:** The findings from this study found that the average financial ratio calculation for Banggai Regency from 2017-2021 is still very low and has a high dependence on the central government. **Conclusion:** The ratio measurement found that the average calculation of the Banggai Regency Financial ratios from 2017-2021 is still very low and has a high dependence on the central government. National Political Policy. In order to increase PAD, it is recommended to form regulations as a legal basis for the operation of BUMD, carry out regular guidance and supervision. Efforts to overcome national political policies by coordinating related policies that have been set and requesting co-administration funds from the provincial government

**Keywords:** Local government; PAD; Local tax; Political Policy

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini didasari dari permasalahan daerah Kabupaten Banggai yang sampai saat ini masih memiliki ketergantungan yang sangat besar kepada dana bantuan dari pusat untuk membiayai kebutuhan daerah. Hal tersebut memberikan pandangan bahwa pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Banggai belum dikelola secara maksimal serta menandakan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Banggai yang masih sangat rendah. Selain itu juga diperlukan Analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari perhitungan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian daerah, serta pertambahan pendapatan tiap tahunnya. **Tujuan:** Tujuan penelitian

ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab kurangnya PAD Kabupaten Banggai tahun 2017-2021. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Tahun 2017-2021. **Metode:** Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan cara berpikir induktif. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan 4 orang dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai serta dokumentasi dengan dokumen terkait. **Hasil/Temuan:** Temuan dari penelitian ini didapati rata-rata perhitungan rasio Keuangan Kabupaten Banggai dari tahun 2017-2021 masih sangat rendah dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. **Kesimpulan:** Pengukuran rasio didapati rata-rata perhitungan rasio Keuangan Kabupaten Banggai dari tahun 2017-2021 masih sangat rendah dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat, regulasi serta pengawasan pengelolaan pajak yang belum maksimal, minimnya kontribusi BUMD terhadap PAD, dan Kebijakan Politik Nasional. Guna meningkatkan PAD disarankan membentuk regulasi sebagai dasar hukum beroperasinya BUMD, melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin. Upaya mengatasi kebijakan politik nasional dengan melakukan koordinasi terkait kebijakan yang ditetapkan dan meminta dana tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi.

**Kata kunci:** Pemerintah Daerah; PAD; Pajak Daerah; Kebijakan Politik

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah adalah suatu organisasi yang diberikan wewenang penuh untuk mengurus dan mengatur jalannya roda pemerintahan di daerah masing-masing. Kekayaan sumber daya alam masing-masing daerah yang sangat heterogen membuat setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat tidak dapat dijalankan secara penuh oleh tiap-tiap daerah. Kaho (1998) dalam Safi'I (2007) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kebijakan tentang otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang seluas-luasnya untuk pemerintah daerah mengembangkan potensi wilayah yang dimiliki daerah masing-masing. PAD merupakan salah satu indikator yang mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengetahui tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Santoso (1995:20) mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. berikut merupakan tabel besaran penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah**

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
2017	Rp186.690.738.617	Rp1.666.846.756.173	Rp1.508.349.308
2018	Rp135.426.630.832	Rp1.669.983.644.415	Rp46.598.645.754
2019	Rp165.863.778.696	Rp1.681.636.816.770	Rp51.006.094.647
2020	Rp157.994.144.272	Rp1.715.437.686.819	Rp86.274.522.653
2021	Rp190.462.129.225	Rp1.867.053.767.116	Rp58.288.554.640

Sumber: Diolah penulis dari LRA APBD Kabupaten Banggai 2017-2021

Tabel 1.1 memperlihatkan kondisi PAD Kabupaten Banggai yang masih sangat rendah dibandingkan dengan pendapatan transfer. Komposisi dari PAD yang terdiri dari sumber pajak, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah masih tidak cukup untuk meningkatkan kontribusi PAD Kabupaten Banggai.

Pemerintah Kabupaten Banggai harus lebih memperhatikan kembali keadaan kas daerah yang menjadi alat ukur kemandirian daerah. Halim (2004) berpendapat bahwa Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat karena telah membayar kewajibannya yaitu pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan. Setiap potensi yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD harus lebih diperhatikan dan dikelola secara optimal agar dapat memenuhi kebutuhan belanja daerah. Jika melihat perbandingan PAD dengan belanja daerah masih terdapat selisih yang sangat besar. Berikut perbandingan PAD dan Belanja Daerah dalam realisasi anggaran Kabupaten Banggai.

**Tabel 1.2**  
**Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kota Bandung**

Tahun	PAD	Belanja	%
2017	Rp186.690.738.617	Rp1.943.503.515.607	9,61
2018	Rp135.426.630.832	Rp1.865.244.052.799	7,26
2019	Rp165.863.778.696	Rp1.897.560.084.440	8,74
2020	Rp157.994.144.272	Rp1.823.685.331.255	8,66
2021	Rp190.462.129.225	Rp2.009.070.705.713	9,48

Sumber: Diolah penulis dari LRA APBD Kabupaten Banggai 2017-2021

Berdasarkan Tabel 1.2 kontribusi PAD terhadap Pendapatan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah masih sangat kecil, bahkan tidak mencapai 10%. Nilai tersebut cukup fluktuatif jika dilihat dari tahun ke tahun. Kondisi ekonomi global yang disebabkan oleh covid-19 menjadi salah satu alasan kurangnya kontribusi PAD dalam pendapatan daerah. keadaan tersebut menandakan sumber pendanaan Kabupaten Banggai masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan urusan pemerintahannya sendiri sehingga masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap transfer pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.

### 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ketergantungan penerimaan transfer pusat ke daerah yang sangat tinggi merupakan permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal dan menunjukkan kemandirian daerah yang masih sangat rendah di daerah Kabupaten Banggai. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis terhadap PAD untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banggai berupa perhitungan rasio desentralisasi, rasio ketergantungan, dan rasio kemandirian daerah, dan pertumbuhan pendapatan per tahun. Berdasarkan data dan uraian dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penulis terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam analisis Kemandirian Keuangan Daerah maupun optimalisasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD di suatu daerah. Penelitian Krest D. Tolosang berjudul Pengaruh Pertumbuhan ekonomi dan PAD Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon (Krest, 2018), menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian Keuangan daerah Kota Tomohon. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian Keuangan Kota Manado. Pertumbuhan ekonomi dan PAD secara Bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandiran Keuangan Kota Tomohon. Penelitian Irma Suryani menemukan bahwa Tingkat kemandirian Keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018 masuk dalam kategori rendah. Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi tingkat kemandirian Keuangan daerah dimana, ketika pendapatan Asli Daerah meningkat maka tingkat kemandirian Keuangan daerah juga akan meningkat (Irma, 2019). Penelitian Kamilaus Konstanse Oki dkk menemukan bahwa Rasio Desentralisasi Fiskal kabupaten Belu dikategorikan sangat kurang. Tingginya rasio ketergantungan yang sangat pada pemerintah pusat. rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah dan pola instruktif. Kabupaten Belu memiliki kelebihan karena berada di wilayah perbatasan yang miliki nilai strategis ekonomi dan politik. Selain nilai strategis, kabupaten Belu memiliki potensi sumber daya alam potensial baik sektor pertanian, peternakan, pertambangan, sumber daya laut, pariwisata dan lainnya. (Kamilaus dkk, 2020), Penelitian Manasep Orocomna dkk menyimpulkan bahwa menyimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Teluk Bintuni masih sangat kurang. Dapat dilihat bahwa Kabupaten Teluk Bintuni memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah belum bisa diandalkan bagi daerah dikarenakan rendahnya sumber pendapatan dari retribusi dan pajak (Manasep, 2016). Berdasarkan Penelitian Dwi Purnamasari & Isna Rodiyah tentang analisis kemandirian Keuangan Kabupaten Sidoarjo tahun 2010-2014 menjelaskan bahwa hasil dari rasio kemandirian yang telah dihitung menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki status kemandirian yang rendah atau berada pada pola hubungan konsultatif. Kontribusi dari PAD terhadap APBD Kabupaten Sidoarjo masih terbelang rendah atau kurang. Kurangnya komitmen pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif dalam menunjang PAD yang berpengaruh terhadap besaran peningkatan kemandirian keuangan daerah (Dwi & Isna, 2019)

### **1.4. Pernyataan kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan mengenai Analisis terhadap PAD dalam meningkatkan Kemandirian Daerah dalam hal ini bidang finansial yaitu dengan mengoptimalkan pendapatan yang saat ini diperoleh daerah Kabupaten Banggai serta memaksimalkan peran BUMD untuk meningkatkan PAD. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan cara berpikir induktif. Selanjutnya pengukuran atau indikator yang digunakan menggunakan pendapat dari Mahmudi (Mahmudi, 2019) yang memaparkan Analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari perhitungan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian daerah, serta pertambahan pendapatan tiap tahunnya.. Perbedaan lainnya adalah penulis focus membahas PAD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tahun 2017-2021

### **1.5. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memperoleh gambaran mengenai penyebab kurangnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai tahun 2017-2021 serta factor-faktor penghambat dan Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Banggai

## **II. METODE**

Metode yang diambil penulis untuk melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan cara menganalisis permasalahan berdasarkan keadaan yang sebenarnya dengan tujuan agar dapat memperoleh data dan informasi sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dan mendukung penelitian ini. Pada data primer dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat yang terkait, yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Pendapatan Daerah, dan Kepala Sub bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, sedangkan pada data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017-2021.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis melakukan analisis mengenai Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan Kemandirian daerah menggunakan pendekatan rasio Keuangan sebagai dasar perhitungan menggunakan pendapat Mahmudi melalui perhitungan derajat desentralisasi, Rasio Ketergantungan, Rasio Kemandirian Daerah, dan Pertumbuhan Pendapatan Tahun Berjalan. Adapun Pembahasan dapat dilihat pada Subbab berikut.

### **3.1. Derajat Desentralisasi**

Derajat desentralisasi dilakukan berdasarkan perhitungan yang dilakukan berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. melalui perhitungan ini, diketahui bahwa semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat desentralisasi menggambarkan suatu kemampuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya guna membiayai otonomi daerah. Rasio ini dapat dihitung dan di dapat dengan membandingkan antara jumlah PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi Kabupaten Banggai dari tahun 2017-2021 dengan rata-rata 8,63%. Jika disesuaikan berdasarkan kriteria penilaian Derajat Desentralisasi, Kabupaten Banggai masuk dalam interval 0-10%. Oleh karena itu kriteria yang diperoleh Kabupaten Banggai sesuai perhitungan tersebut memperoleh kriteria Sangat Kurang. Berdasarkan kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa kabupaten Banggai masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada besarnya dana transfer pusat.

### **3.2. Rasio Ketergantungan**

Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan transfer. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan eksternal khususnya pendapatan transfer. Rasio ini menunjukkan seberapa besar tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi. Semakin tinggi hasil dari rasio ini, berarti semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau provinsi, dan begitu

pula sebaliknya. Hasil presentasi perhitungan rasio ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dari tahun 2017-2021 menunjukkan nilai yang keseluruhan berada pada angka lebih dari 50%. Hal tersebut menunjukkan Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai termasuk kriteria sangat tinggi.

### **3.3. Rasio Kemandirian Daerah**

Rasio Kemandirian Daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian daerah di suatu wilayah. Rasio kemandirian keuangan dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki kemandirian keuangan daerah yang semakin tinggi pula. Hasil dari perhitungan kemandirian Keuangan daerah Kabupaten Banggai dari tahun 2017-2021 rata-rata berada pada nilai 9,71%. Berdasarkan kriteria yang disebutkan oleh para ahli, persentasi kemandirian daerah yang berada pada angka 0-25% menunjukkan tingkat kemampuan Keuangan di suatu daerah masih rendah sekali. Pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah pola hubungan instruktif, yang artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

### **3.4. Pertumbuhan Pendapatan Daerah**

Pertumbuhan pendapatan Daerah merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selma beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungan meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya. pertumbuhan pendapatan Kabupaten Banggai mulai tahun 2017-2021 mengalami keadaan yang menarik. Pada tahun 2017, pertumbuhan pendapatan dari tahun sebelumnya berada pada angka 11,50% dan menjadi nilai tertinggi dari 5 tahun ke belakang tersebut. Akan tetapi pada tahun 2018 angka tersebut menurun drastis bahkan minus dan berada pada angka -0,16%. Pada tahun-tahun selanjutnya sampai tahun 2021, pertumbuhan pendapatan kabupaten Banggai akhirnya bergerak naik Kembali mulai dari tahun 2019 menjadi 2,51%, 2020 ke angka 3,22% dan 7,97% di tahun 2021. Peningkatan pertumbuhan pendapatan Kabupaten Banggai tidak lepas dari peran pemerintah daerah yang terus berupaya semaksimal mungkin untuk menguarkan Kembali pendapatan daerah.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian terhadap kondisi PAD yang dilakukan di daerah Kabupaten Banggai dapat menjadi rujukan kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang tepat dan sesuai sasaran sehingga keadaan keuangan daerah dapat membaik. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banggai yaitu Pendapatan Asli Daerah yang belum optimal dikarenakan kurang maksimalnya pemungutan pajak dan retribusi serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak, Minimnya kontribusi BUMD dalam membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Adanya politik anggaran nasional yang menyebabkan kurangnya potensi dari pendapatan daerah. Beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah seperti dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai melalui program Program Bapantau ASN, perbaikan sistem pembayaran dan meningkatkan pengawasan pengelolaan pajak Daerah dan melaksanakan kerja sama dengan OPD yang dapat membantu kegiatan penegakan Perda mengenai Pajak dan retribusi serta penerapan sanksi bagi pelanggar. Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu dengan menindaklanjuti peraturan perundang-undangan, perbaikan kelembagaan BUMD, melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin dalam

berjalannya pengelolaan BUMD. Hal lain yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan koordinasi kembali terkait kebijakan yang dibuat dan kemudian meminta dana tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi. Pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Banggai yang bersifat instruktif memiliki pengertian peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Hal tersebut menandakan pemerintah daerah Kabupaten Banggai masih belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis Menyimpulkan kondisi PAD Kabupaten Banggai masih sangat rendah dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Keadaan tersebut menjadikan pemerintah daerah kabupaten Banggai belum dapat mencapai Kemandirian daerah secara fiskal. Terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan kurang maksimalnya PAD yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, regulasi serta pengawasan pengelolaan pajak yang belum maksimal, minimnya kontribusi BUMD terhadap PAD, dan Kebijakan Politik Nasional. Oleh karena itu, beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat membayar pajak yaitu dengan pelaksanaan program Bapantau ASN, mempermudah sistem pembayaran pajak dan meningkatkan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta penerapan sanksi kepada pelanggar. Pemerintah juga harus mengatasi minimnya kontribusi BUMD terhadap PAD dengan pembentukan regulasi sebagai dasar hukum beroperasinya BUMD, melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin. Serta mengatasi kebijakan politik nasional dengan melakukan koordinasi terkait kebijakan yang ditetapkan dan meminta dana tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu keterbatasan waktu penelitian yang terbatas serta diperlukan kesesuaian waktu yang dimiliki oleh beberapa informan untuk melakukan wawancara.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari terhadap awalnya penelitian ini, sehingga penulis menyarankan agar dikemudian hari dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Analisis PAD Pemerintah daerah Kabupaten Banggai pada tahun selanjutnya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan Terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Brotodihardjo, S. (1995), Pengantar Ilmu Pajak, Bandung: PT. Eresco,  
Halim, A. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat  
Mahmudi. (2019), Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Erlangga.  
Oki, K. dkk. (2020) Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 5(2) <https://jurnal.unimor.ac.id/JEP/article/view/584/328>  
Orocomna, M., Bharanti, B. E., & Allo Layuk, P. K. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2010-2015. KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah), 2(3). <https://doi.org/10.52062/keuda.v2i3.725>

- Purnamasari, D., & Rodiyah, I. (2019). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010 – 2014. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i1.814>
- Safi'i, H. M. (2007). *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*. Cetakan I. Malang: Averroes Press
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Suryani, I. (2019). Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11(2) <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jira/article/view/2673/1802>
- Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan PAD Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/20689>

